

Nadiya Alifa Firdaus
2413031066

1. Tantangan Utama PT Sumber Hijau dalam Menyelaraskan Ekspansi dengan Keberlanjutan & SDGs

PT Sumber Hijau menghadapi beberapa tantangan besar ketika ingin memperluas usaha sambil tetap mengikuti prinsip keberlanjutan dan pelaporan SDGs, antara lain:

a. Risiko lingkungan akibat ekspansi

Rencana perluasan lahan di Kalimantan Timur berpotensi mengurangi tutupan hutan dan merusak ekosistem. Hal ini berlawanan dengan komitmen perusahaan terhadap:

SDG 13 (aksi iklim), dan

SDG 15 (perlindungan ekosistem daratan).

b. Penolakan masyarakat adat dan LSM

Ekspansi dapat menimbulkan konflik sosial terkait hak tanah, kelestarian budaya, dan keberlanjutan sumber daya. Jika tidak dikelola dengan baik, ini dapat mengurangi kepercayaan publik.

c. Tekanan dari investor global berbasis ESG

Investor internasional menuntut pelaporan yang lebih transparan mengenai dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola. PT Sumber Hijau perlu memberikan data yang dapat diverifikasi, bukan sekadar klaim keberlanjutan.

d. Keterbatasan PSAK terkait pelaporan ESG

PSAK masih fokus pada angka-angka keuangan tradisional sehingga belum mengatur secara penuh indikator keberlanjutan, seperti emisi karbon atau dampak pada keanekaragaman hayati.

e. Menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan

Perusahaan harus memastikan bahwa SDG 8 (pertumbuhan ekonomi & pekerjaan layak) tidak dicapai dengan mengorbankan SDG 13 dan 15.

2. Teori Akuntansi Positif vs Normatif dalam Menjelaskan Pelaporan Keberlanjutan

a. Perspektif Teori Akuntansi Positif (PAT)

PAT mencoba memahami motif manajemen ketika memilih kebijakan akuntansi. Dalam kasus ini:

Perusahaan meningkatkan pelaporan keberlanjutan untuk merespons tekanan politik, menjaga reputasi, dan menarik investor ESG.

Pelaporan SDGs dapat menjadi cara manajemen mengurangi kritik publik dan memperkuat legitimasi.

b. Perspektif Teori Akuntansi Normatif

Teori normatif menekankan apa yang seharusnya dilakukan agar pelaporan bermanfaat bagi publik.

Dari sudut pandang normatif:

Pelaporan SDGs seharusnya mencerminkan komitmen etis perusahaan.

Informasi keberlanjutan harus relevan, transparan, dan dapat dipercaya agar membantu stakeholder menilai dampak perusahaan.

3. Cara Mengintegrasikan SDGs ke dalam Laporan Keuangan Meski PSAK Belum Mengatur ESG

Meskipun PSAK belum memuat aturan khusus pelaporan ESG, PT Sumber Hijau tetap dapat mengintegrasikan isu keberlanjutan melalui beberapa cara:

a. Menggunakan standar pelaporan keberlanjutan yang diakui global

GRI Standards untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial.

SASB untuk mengungkap isu material sektor agribisnis.

Integrated Reporting (IIRC) untuk menghubungkan kinerja finansial dan non-finansial.

TCFD untuk mengungkap risiko iklim (terkait SDG 13).

b. Menyajikan ESG dalam bentuk laporan terintegrasi

Laporan tahunan dapat dibuat dalam format integrated report yang menggabungkan:

data keuangan (PSAK)

data keberlanjutan (GRI/IIRC/SDGs)

c. Menambahkan “sustainability notes” dalam catatan atas laporan keuangan

Perusahaan dapat memasukkan:

estimasi biaya lingkungan,

kewajiban reklamasi,

dampak perubahan iklim terhadap aset dan pendapatan.

4. Saran Narasi Laporan Keberlanjutan yang Efektif untuk Stakeholder

Sebagai akuntan, narasi laporan keberlanjutan sebaiknya:

a. Menggunakan bahasa yang jujur dan berbasis data

Transparan mengenai dampak negatif dan positif, bukan hanya pencapaian.

b. Menghubungkan kegiatan bisnis dengan SDGs secara konkret

Contoh:

kontribusi terhadap pekerjaan lokal (SDG 8),

strategi mengurangi emisi (SDG 13),

perlindungan hutan dan biodiversitas (SDG 15).

c. Menyajikan bukti dan indikator terukur

Misalnya:

luasan hutan yang dilindungi,

jumlah tenaga kerja lokal yang diserap,

pengurangan emisi tahunan.

d. Menjelaskan program keterlibatan masyarakat

Karena konflik sosial menjadi isu utama, perusahaan harus menunjukkan bagaimana dialog, konsultasi, dan persetujuan masyarakat adat dilakukan.

e. Menyampaikan komitmen jangka panjang

Narasi tidak boleh bersifat sesaat. Perusahaan perlu menunjukkan roadmap keberlanjutan 5–10 tahun.

f. Menyampaikan mekanisme verifikasi

Untuk menghindari kesan greenwashing, laporan harus:

diaudit pihak independen,

memuat metodologi yang jelas,

menjelaskan batasan data.